

ABSTRAK

RISTANTIO RAIS, NIM : 271410065, “PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN MELALUI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN NOMOR 33-12/23/600.1/2012 DI WILAYAH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA GORONTALO” Pembimbing I Moh. R. Puluhulawa, SH. MHum, Pembimbing II Bayu Lesmana Taruna, SH., MH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui keputusan direktur jenderal nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah perusahaan listrik Negara gorontalo, serta hambatan dalam penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan melalui keputusan direktur jenderal nomor 33-12/23/600.1/2012 di wilayah perusahaan listrik Negara gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan wawancara, dan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh menunjukkan bahwa penerapan undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menggunakan surat keputusan Direktur Jenderal ketenagalistrikan nomor 33-12/23/600.1/2012 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. Dalam penerapannya karyawan akan menerima sanksi yang lebih berat apabila ditemukan sebuah pelanggaran, tapi yang lebih banyak melakukan pelanggaran adalah masyarakat biasa atau pelanggan listrik. Ada juga tenaga kontrak yang sering melakukan pelanggaran. Apabila ditemukan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik akan diberikan sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi untuk karyawan terbagi atas tiga jenis yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat serta untuk pelanggan listrik dengan membayar tagihan susulan. Selama masalah pelanggaran pemakaian tenaga listrik masih bisa diselesaikan dengan membayar sanksi administrasi maka prosesnya hanya sampai pada tingkat pemeriksaan pihak yang berwenang atau petugas dari PLN, dengan demikian akan menghapuskan pelanggan yang melakukan pelanggaran dari segala tuntutan.

Akan tetapi jika di temukan melakukan pelanggaran namun tidak mau membayar sanksi administrasi maka akan di serahkan kepada pihak kepolisian dengan ancaman ‘Sanksi Pidana’

Kata Kunci : Penerapan undang undang, keputusan direktur jenderal, ketenagalistrikan

ABSTRACT

RISTANTIO RAIS, STUDENT ID: 271410065, "THE APPLICATION OF LAW NUMBER 30 YEAR 2009 ON ELECTRICITY THROUGH THE REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF ELECTRICITY NUMBER 33-12/23/600.1/2012 AT STATE ELECTRICITY COMPANY OF GORONTALO." The principal supervisor was Moh. R. Puluhulawa, SH, M.Hum and the co-supervisor was Bayu Lesmana Taruna, SH., MH.

The research aimed at investigating the application of law number 30 year 2009 on the electricity through the regulation of director general number 33-12/23/600.1/2012 at State Electricity Company of Gorontalo, and the obstacle factors of law number 30 year 2009 about the electricity through the regulation of director general number 33-12/23/600.1/2012 at State Electricity Company of Gorontalo. The research applied empirical method. The techniques of data collection were observation and interview. Data were analyzed by qualitative descriptive analysis.

Based on the research result it can be concluded that in the application of law number 30 year 2009 about the electricity through the regulation of director general number 33-12/23/600.1/2012 at State Electricity Company of Gorontalo, the employees would be given more severe sanction if they were found committed in the violation. However, the public, electricity users, and freelancers were found to be the most in committing violation.

Administration sanctions for the employee were divided into mild, moderate and severe sanction, and for the electricity's customers was by paying additional payment. As long as the problem of the implementation of electricity use can be settled by paying administration sanction, then the process would only just interrogation by either police or State Electricity Company's employee. Thus, it would eliminate the customers who commit the violation from all the demand. However, if the general violation occurred and the party involved did not want to pay the administration sanction, then they would be reported to the police office to be investigated with the thread "Crimminal Sanction."

Keywords: The Application of Law, Regulation of Director General, Electricity

